

# ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA PALU

Asharrini Mastura

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

## Abstract

*The purpose of this study was to identify and analyze policy implementation and administration of the Regional Financial Accountability Office of Financial Management and the Regional Asset Palu. The main theories used in this study are those of Edward III about four factors that influence policy implementation is communication, resources, disposition and the structure of the bureaucracy. This type of research uses descriptive survey techniques. The population numbered 189 people and drawn purposively sampled to obtain 40 respondents. The results indicate the implementation of policy at the Department of Revenue and Finance and Asset Management Palu District Administration policy and Financial Management Accountability consists of four indicators, namely communication, resources, disposition and the structure of the bureaucracy. Of the four sub indicators are still indicators that still need to be improved, namely sub-indicators of physical facilities, the implementor of policies and attitudes that lead policy makers on creating good results. While inhibiting factors or constraints that are more focused on the principle of disbursement mechanisms are not timely and orderly financial administration should be based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 55 Year 2008. In addition, the quality of human resources is still low, facilities and infrastructure have not mamadai and lack of coordination between government Regional, Provincial and Central.*

**Keywords:** Administration, Accountability, Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure.

Kritik yang muncul selama ini adalah Pemerintah Pusat terlalu dominan terhadap daerah. Pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang selama ini dikembangkan Pemerintah Pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. Pemerintah Daerah kurang diberi keleluasaan (*local discretion*) untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. Kewenangan yang selama ini diberikan kepada Daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian Daerah, tetapi justru ketergantungan Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Dampak dari sistem yang selama ini dianut menyebabkan Pemerintah Daerah tidak responsif dan kurang peka terhadap aspirasi

masyarakat daerah. Banyak proyek pembangunan daerah yang tidak menghiraukan manfaat yang dirasakan masyarakat, karena beberapa proyek merupakan proyek titipan yang sarat dengan petunjuk dan arahan dari Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat melakukan campur tangan terhadap Daerah dengan alasan untuk menjamin stabilitas nasional dan masih lemahnya sumber daya manusia yang ada di Daerah. Karena dua alasan tersebut, sentralisasi otoritas dipandang sebagai prasyarat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya pandangan tersebut terbukti benar. Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara

lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan ekonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pengelolaan penerimaan daerah dan pengelolaan pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 menyebabkan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan *budgeting reform* atau reformasi anggaran.

Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi: Akuntabilitas; *Value for Money*; Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*); Transparansi; dan Pengendalian. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan harus di dasarkan pada asas Tertib, pada Peraturan dan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta berkeadilan.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah dan dalam menjalankan kekuasaannya pengelolaan keuangan daerah dilimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada

sekretariat daerah selaku koordinator keuangan, kepala SKPD selaku PPKD dan pejabat pengguna anggaran. Dan dalam satu SKPD ditetapkan satu bendahara pengelola keuangan di bawah tanggung jawab kepala SKPKD selaku PPKD. Selain itu SKPKD juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun rancangan APBD dan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah, melaksanakan fungsi BUD, menyusun pertanggung jawaban keuangan daerah dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah secara terkontrol dan terfokus.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka implementasi kebijakan penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, masih sering terjadi hambatan dalam pelaksanaannya, sering terjadi keterlambatan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan kegiatan. Menurut ketentuan yang berlaku panjar kerja harus dipertanggung jawabkan selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah menerima uang muka kerja, tetapi kenyataan yang ada sampai saat ini menunjukkan, pertanggungjawaban panjar kerja masih sering diabaikan.

Keterlambatan pertanggungjawaban disebabkan karena kurang koordinasi antara pengelola keuangan dengan pemakai keuangan daerah/SKPD, sehingga proses Surat Pertanggung Jawaban Uang Muka Kerja (SPJ-UMK) juga turut terlambat, faktor masalah di atas adalah merupakan alasan sehingga peneliti berkeinginan akan mengkaji "Implementasi Kebijakan Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu".

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kebijakan yang sesuai dengan kehendak publik, segenap

pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan publik tersebut, perlu mencermati dan mengaktualisasi berbagai dimensi pembuatan kebijakan, termasuk permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi sekitar policy makin process itu. Islamy (2000:127), berpendapat bahwa ciri suatu kebijakan adalah :

- a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
- b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
- c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- d. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- e. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
- f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- g. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Kebijaksanaan publik (negara) disusun melalui tahap-tahap : (1) Pembentukan Agenda; (2) Perumusan dan Legitimasi; (3) Pelaksanaan kebijakan; (4) Penilaian Kebijakan; dan (5) Kelanjutan Kebijakan. Sedangkan Dunn (1998) lebih jelas mengemukakan bahwa tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan meliputi : (1) Penyusunan Agenda; (2) Formulasi Kebijakan; (3) Adopsi kebijakan; (4) Implementasi Kebijakan; (5) Penilaian Kebijakan (Johan, 2003: 44).

Langkah pelaksanaan (implementasi) dalam rangkaian proses kebijakan dapat disamakan dengan fungsi aksi (*actuating*) dalam rangkaian fungsi manajemen. Kalau dalam rangkaian fungsi manajemen, aksi merupakan fungsi tengah yang terkait erat dengan berbagai fungsi awal, seperti fungsi

perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) dan pembenahan personil (*staffing*), serta terkait dengan fungsi akhir yakni pengawasan (*controlling*), maka pelaksanaan juga terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah-langkah awal dan monitoring serta evaluasi sebagai langkah-langkah akhir dalam rangkaian langkah-langkah kebijakan.

Faktor kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses pelaksanaan, karena yang dilaksanakan justru adalah kebijakan itu sendiri. Tanpa ada kebijakan tidak ada yang dapat dilaksanakan. Selain itu, berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh dua hal yaitu kualitas kebijakan dan ketepatan strategi pelaksanaan.

Menurut Edward III (1984:147) terdapat empat faktor yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi. Keempat faktor tersebut adalah :

- a. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pikiran dan prasarananya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan setiap unsur manusia dan sumber daya akan selalu berusaha dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukannya”.

- b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan atau aturan serta bagaimana akuratnya dalam menyampaikan ketentuan-ketentuan tersebut, namun jika personil yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber-sumber untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

c. Faktor Disposisi (*dispositions*)

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana (implementasi) untuk melaksanakan kebijaksanaan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementasi) tidak hanya harus mengetahui apa yang semestinya dilakukan, juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana memahami tujuan dan bagaimana cara melaksanakannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun implementasi masih bisa belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi (*disefficiencies bureaucratic structure*) yang ada. Inefisiensi struktur birokrasi juga dapat memboroskan sumber daya yang langka, terjadinya kekacauan dan kebingungan yang kesemuanya akan mengarah pada penyimpangan pelaksanaan kebijakan dari tujuan semula.

## METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan jenis penelitian kualitatif, perlu diperhatikan metode yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan ini disebut dengan survey. Menurut Singarimbun (1994: 25) ciri penelitian ini adalah data dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Dari penelitian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini seluruh pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu yang berjumlah 189 orang. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Sampel Responden yang dipilih

dalam penelitian ini adalah, berjumlah 40 orang. Penulis juga menggunakan metode pengumpulan data dan instrumen penelitian antara lain observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom serta Perda Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5), serta untuk mendukung percepatan pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Dinas, perlu adanya wadah penyelenggaraan kewenangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, maka perlu mewadahi penyelenggaraan kewenangan tersebut sesuai lingkup tugas masing-masing ke dalam suatu Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Palu.

Dalam bahasa Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi antara lain; **Komunikasi** suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. **Sumber daya**, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang

dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. **Disposisi** atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. **Struktur birokrasi** didasarkan pada *standard operating procedure* yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

## Pembahasan

### **Implementasi Kebijakan Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Pengelola Keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu**

#### a. Komunikasi

Dalam ruang lingkup yang lebih rinci maka komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi, jika seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya komunikasi hanya terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima dan efek. Unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau elemen dalam komunikasi.

Sebuah keputusan atau kebijakan untuk dapat mencapai hasil yang maksimal, maka harus pula disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memahami dan mengerti dan mematuhi segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu dengan adanya komunikasi maka keputusan atau kebijakan pemerintah tersebut akan diketahui tingkat keberhasilannya, sehingga dapat diketahui pula kegunaannya. Demikian juga Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, dalam upaya meningkatkan efektifitas pelayanan, maka berbagai kebijakan telah dilakukan sebagai wujud dari pengejawentahan visi dan misi Kota Palu umumnya dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada khususnya.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan tersebut, maka kebijakan yang telah ditetapkan dalam upaya peningkatan pelayanan harus diketahui oleh publik sebagai pengguna jasa, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Kebijakan**

No.	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi (f)	Bobot (x)	Nilai (f.x)	Persentase
1	Sangat Memadai	9	5	45	22,5
2	Memadai	21	4	84	52,5
3	Cukup Memadai	7	3	21	17,5
4	Kurang Memadai	3	2	6	7,5
5	Tidak Memadai	-	1	0	0
Jumlah		40		161	100

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa 10 responden atau 22,5% memberikan pernyataan sangat memadai terhadap sosialisasi kebijakan dalam upaya meminimalisir hambatan, 21 responden (52,5%) memberikan pernyataan memadai, 7 responden atau 17,5% memberikan pernyataan cukup memadai, 3 responden atau 7,5% menyatakan kurang memadai dan tidak

ada responden yang menjawab tidak memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan dalam upaya meminimalisir hambatan telah dilaksanakan dengan baik.

Hasil dari tanggapan responden di atas, maka untuk mengoptimalkan kebijakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, kebijakan tersebut

telah disosialisasikan secara kontinyu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui tentang kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Tidak hanya itu, sosialisasi sangat berguna untuk memberikan pemahaman kepada seseorang tentang kebijakan yang sedang berlangsung. Dari tanggapan responden diperlukan sosialisasi yang dilakukan sesering mungkin dan bukan hanya sekali atau dua kali.

#### b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang, sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Manusia memilih teknologi, manusia yang mencari modal, manusia yang menggunakan

dan memelihara, disamping manusia dapat menjadi salah satu sumber keunggulan bersaing dan sumber keunggulan bersaing yang langgeng.

Berbicara masalah sumber daya manusia, sebenarnya dapat kita lihat dari dua aspek, yakni kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia yang kurang penting kontribusinya dalam pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas. Bahkan kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental), seperti yang tergambar pada tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Tanggapan Responden Tentang Kompetensi Staf Pada**  
**Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu**

No.	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi (f)	Bobot (x)	Nilai (f.x)	Persentase
1	Sdh Sangat Sesuai	7	5	35	17,5
2	Sesuai	11	4	44	27,5
3	Cukup Sesuai	18	3	54	45
4	Kurang Sesuai	4	2	8	10
5	Tidak Sesuai	0	1	0	-
Jumlah		40		141	100

Sumber: Data Primer, 2011

Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 7 responden (17,5%) memberikan tanggapan bahwa kompetensi staf pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu Sudah Sangat Sesuai dalam mengimplementasikan kebijakan. Sedangkan sebanyak 11 responden (27,5%) mengatakan Sesuai. Sementara itu yang memberikan tanggapan Cukup Sesuai berjumlah 18 responden (45%), sedangkan tanggapan Kurang Sesuai berjumlah 4 responden atau 10% dan tidak ada responden yang memberikan tanggapan bahwa kompetensi staf pada Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu Tidak Sesuai dalam menunjang kebijakan.

Dengan konfigurasi jawaban responden maka dapatlah disimpulkan bahwa walaupun masih terdapat beberapa responden yang memberikan jawaban Kurang dan Tidak profesional terhadap pernyataan di atas, namun secara akumulatif dapatlah dikatakan bahwa 66,49% responden menyatakan bahwa staf atau pegawai pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu profesional dalam menunjang penyusunan kebijakan.

## c. Disposisi

Keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu dapat diukur dan dilihat dari partisipasi

atau kecenderungan pegawai/staf sebagai pelaksana kebijakan dalam memahami atau memberi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Seperti yang dinyatakan responden dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
**Tanggapan Responden Tentang Pemahaman**  
**Eksistensi, Isi, Maksud dan Tujuan Kebijakan**  
**Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

No.	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi (f)	Bobot (x)	Nilai (f.x)	Persentase
1	Sdh Sangat Paham	6	5	30	15
2	Paham	4	4	16	10
3	Cukup Paham	19	3	57	47,5
4	Kurang Paham	8	2	16	20
5	Tidak Paham	3	1	3	7,5
Jumlah		40		122	100

Sumber: Data Primer, 2011

Hasil tanggapan responden tentang pemahaman eksistensi, isi, maksud dan tujuan dalam memberi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan, maka dari 40 responden, 6 responden (15%) memberikan jawaban Sudah Sangat Paham, dan 4 responden (10%) memberikan tanggapan Paham. Sementara itu, 19 responden lainnya atau 47,5% menjawab Cukup Paham. Selanjutnya 8 responden (20%) memberikan jawaban Kurang Paham, sedangkan 3 responden (7,5) memberikan tanggapan Tidak Paham terhadap kebijakan tersebut.

Sikap kurang baik pelaksana kebijakan dalam memberi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya dilakukan oleh individual atau oknum tertentu dengan alasan bahwa oknum tersebut kurang memahami apa isi dari kebijakan tersebut.

## d. Struktur Organisasi

Birokrasi pada prinsipnya merupakan suatu gambaran akan tugas pokok dan fungsi setiap organisasi, di mana dengan adanya birokrasi yang baik akan memberikan kejelasan mengenai batasan kewenangan dan tanggung jawab setiap pengurus atau anggota

yang terlibat. Melalui birokrasi dapat dijadikan sebagai alas untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan dan keterbatasan manusia dengan jalan mendistribusikan tugas-tugas secara merata, sehingga tujuan organisasi dapat berhasilguna dan berdayaguna. Dari susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, maka dapat diketahui mengenai birokrasi, wewenang dan tanggung jawab dari sekelompok orang-orang yang terlibat dalam hubungan kerja sama yang ada pada kantor tersebut. Selain itu birokrasi juga akan memberikan gambaran mengenai sistem kerja dalam menunjang pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu dalam melaksanakan kebijakan juga dipengaruhi birokrasi yang telah ditetapkan. Sistem atau pola yang digunakan dalam berbagai urusan dinas, misalnya dalam hal pelayanan kepada stakeholder dan tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan wujud dari pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk mengetahui tanggapan responden tentang

tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palu dalam melaksanakan kebijakan, maka dapat disimak dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
**Tanggapan Responden Tentang**  
**Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) di**  
**Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu**

No.	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi (f)	Bobot (x)	Nilai (f.x)	Persentase
1	Sangat Memadai	9	5	45	22,5
2	Memadai	20	4	80	50
3	Cukup Memadai	7	3	21	17,5
4	Kurang Memadai	4	2	8	10
5	Tidak Memadai	-	1	0	-
Jumlah		40		154	100

Sumber: Data Primer, 2011

Tanggapan responden tentang tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu sebagai referensi untuk melaksanakan kebijakan dapat dilihat pada tabel di atas, dapatlah dikemukakan bahwa dari 40 responden, 9 responden (19,15%) responden menanggapi bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu telah tersedia dengan Sangat Memadai. Kemudian, 20 responden lainnya (42,55%) menjawab Memadai, dan 7 responden (13,93%) menjawab Cukup Memadai, sedangkan 4 responden (12,77%) memberikan tanggapan tidak memadai tentang pernyataan item di atas, serta tidak ada responden yang mengatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu tidak memadai.

Pembahasan dalam sub variabel berikutnya yaitu masalah struktur organisasi. Organisasi dapat dikatakan merupakan suatu yang sangat dibutuhkan dan urgen dalam satu organisasi untuk mewujudkan pembagian kerja dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab tertentu. Dengan kata lain

bahwa birokrasi adalah pengorganisasian untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam, mewujudkan kerjasama sejumlah orang yang bermaksud mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, maka kendala utama yang terjadi adalah *mekanisme pencairan dana yang tidak tepat waktu*. Selain itu, ada juga hambatan lain yang terjadi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu yakni belum tercapainya kinerja yang diharapkan misalnya kurangnya Sumber Daya Manusia; kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya koordinasi.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal; *pertama*; penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu terhadap kebijakan Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Pengelola Keuangan yang terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi (*communication*),



sumberdaya (*resources*), disposisi (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic*). Dari keempat indikator tersebut masih ada sub indikator yang masih perlu ditingkatkan yaitu sub indikator fasilitas fisik, implementor kebijakan dan sikap pembuat kebijakan yang bermuara pada penciptaan hasil yang baik. **Kedua;** faktor kendalanya lebih terfokus pada prinsip *mekanisme pencairan dana yang tidak tepat waktu* serta tertib administrasi keuangan daerah harus berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. Selain itu, Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah, Sarana dan prasarana belum memadai serta Kurangnya koordinasi antara, pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat.

Olehnya itu, maka penelitian ini memberikan rekomendasi antara lain; **pertama;** perlu diberikan penguatan motivasi kepada aparatur yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah baik di SKPD sebagai pengusul maupun pada Biro Keuangan yang melakukan proses penerbitan SP2D harus lebih teliti dan melakukan tertib administrasi keuangan untuk mencegah terjadinya penyimpangan keuangan daerah. **Kedua;** pengelola keuangan daerah harus mentaati dan melakukan sistem aplikasi keuangan daerah dan melakukan koreksi, sehingga pengelolaan keuangan tepat waktu dan optimal. **Ketiga;** peningkatan sarana dan prasarana kerja, khususnya yang berbasis teknologi maju sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan tidak mengalami gagal teknologi. **Keempat;** pada Penyusunan program ditetapkan Skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan pendataan yang ada pada Pemerintah Kota Palu, disamping itu perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat dalam menangani beberapa program. **Kelima;** menyamakan persepsi terhadap system

penyusunan anggaran dan system penilaian serta membuat standar yang baku dalam penilain kinerja.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan: Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Irfan Islamy, M. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1994. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Suhady, Idup. 2000. *Kebijaksanaan Pendayagunaan Aparatur Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggung Jawaban Bendahara.
- Peraturan Wali Kota Palu No. 19 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Kuncoro, Mudrajat dan Abimanyu, Anggito (1995) "Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era deregulasi dan Globalisasi". *KELOLA*, No. 10/IV.